

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Algra, N.E. et al, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Deden Faturrohman dan Wawan Sobari, 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM, Malang
- Firmansyah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Hadjon P, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1997.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Bandung : Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Bandung : penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Visimedia, 2007.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bandung : Bakti, 2004.
- Khudfaizah Dimyat, *Teorisasi Hukum*, Jakarta : Muhamadiyah University Press, Gramedia, 2007.
- Mahfud. M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti", Jakarta, 1983.
- Monica and Jean Charlot, 'Les Groupes Politiques dans leur Environnement' in J. Leca and M. Grawitz (eds.), *Traite de Science Politique*, iii Paris: PUF, 1985.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010
- R. Kranenburg, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- RM MacIver, *The Modern State*, First Edition, London: Oxford University Press, 1955.
- Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta : Penerbit Rajawali, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke lima, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Kedua, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998.

SUMBER JURNAL :

Djarmiko Anom, *“Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,”* Jurnal konstitusi P3KHAM UNS Volume I. No. 1. 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi,* Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

M. Hadi Shubhan, *“Recall” : Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol,* Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (*tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (*tentang Partai Politik*) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 *Tentang Syarat-syarat Penyederhanaan Kepartaian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XI/2013 (Tentang Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 008/PUU-IV/2013 (*Tentang Uji Materi
terhadap Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 12
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik*)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG